PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN MASYARAKAT MAJEMUK INDONESIA

(Oleh : Prof. Dr. Firman. MS. Kons.
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Univ. Negeri Padang)
Email : firmankonselor.org

Abstrak

Berbagai konflik dialami masyarakat majemuk Indonesia setelah terjadi interaksi berbagai suku memiliki budaya berbeda. Tulisan ini memaparkan upaya penanam rasa kebersamaan dan saling pengertian melalui pendidikan multikultural dalam perkembangan teknologi informasi. Pelaksanaan pendidikan multikultural diawali kegiatan merancang kurikulum, dengan menekankan materi tentang hak-hak individual dan kolektif, keadilan dan hak-hak minoritas, kebebasan individual dan kebudayaan, jaminan berbicara bagi kaum minoritas, toleransi antar suku bangsa. Memanfaatkan teknologi informasi dengan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dapat dilakukan dalam pembelajaran multikultural. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran multikultural melalui kegiatan merancang dan mengembangkan media/bahan ajar dari berbagai budaya. Media teknologi informasi yang digunakan guru dalam pembelajaran multikultural dapat menghubungkan berbagai pengetahuan siswa dengan kondisi kehidupan nyata dalam masyarakat.

A. Pendahuluan

Kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke didiami oleh masyarakat majemuk. Kemajemukan masyarakat tersebut ditunjukkan oleh keberanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa dan kebudayaan. Awal perkembangan suku-suku bangsa tersebut menempati wilayah permukiman tertentu dan akhir-akhir ini sebagian anggota masyarakat yang berasal dari berbagai suku berpindah dan bertemu dalam satu wilayah. Pertemuan masyarakat dari berbagai suku itu terlihat secara nyata di perkotaan dan pusat-pusat industri maupun tempat-tempat lain dengan beraneka ragam aktifitas dan kebudayaan secara horizontal. Keberagaman juga ditunjukkan oleh kemajuan ekonomi, teknologi serta organisasi sosial politik dan sebagainya. Kondisi masyarakat serta kebudayaan masing-masing suku berlainan satu lainnya. Hal ini disebabkan oleh latar belakang geografis, sejarah, perkembangan kerajaan-kerajaan besar maupun kecil yang membawa struktur sosial politik berbeda, ditambah dengan pengaruh budaya asing. Interaksi masyarakat dari latar budaya berbeda tidak jarang menyebabkan terjadinya perubahan kebudayaan yang membawa kemajuan atau kemunduran dalam masyarakat.

Pergolakan sosial politik yang terjadi sebagai dampak negatif dari perubahan social budaya dapat merongrong perkembangan masyarakat serta identitas bangsa yang kehidupannya dilandasi oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 45. Bangsa Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai bangsa yang ramah dan memiliki tenggang rasa berubah menjadi bangsa yang brigas dengan memaksakan kehendak sendiri. Kerusuhan yang terjadi silih berganti dari tahun ke tahun berikutnya, misalnya kejadian Situbondo Tahun 1996, Tasik Malaya Tahun 1996, Galela Maluku Tahun 1999, Poso Tahun 2000, tauran antar pelajar serta banyak lagi sederet konflik sampai hari ini masih belum dapat diselesaikan sampai ke akar persoalan, sebagai dampak negative dari perubahan social budaya.

Potensi konflik menjadi sebuah permasalahan yang beragam dalam masyarakat majemuk di Indonesia. Keberagaman etnik yang ada di Indonesia mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkan masyarakat adil makmur dan sejahtera. Gagasan besar tersebut ditemukan belum menyatukan masyarakat dari berbagai lapisan. Kemajemukan masyarakat Indonesia sering terabaikan dalam usaha pembangunan bangsa menuju kebersamaan. Dinamika pergolakan sosial sebagai akibat interaksi antar suku/golongan dalam masyarakat majemuk, menimbulkan ketidak seimbangan atau pembaharuan menuju persatuan dan kesatuan dalam membangun masyarakat yang damai dan sejahtera. Perjalanan bangsa Indonesia sejak dari Sumpah Pemuda Tahun 1928 serta Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, telah mempersatukan masyarakat di Kepulauan Nusantara menjadi satu bangsa. Identitas kebersamaan dengan perasaan satu bangsa menimbulkan berbagai tantangan yang memerlukan pendekatan khusus melalui pendidikan multikultural dalam menanamkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kesatuan kepada generasi muda.

Pendidikan multikultural diartikan sebagai pendidikan yang menawarkan ragam model untuk keragaman budaya dalam masyarakat. Pada gilirannya melalui pendidikan multikultural diharapkan dapat membina sikap peserta didik agar menghargai keragaman budaya masyarakat (Sunarto,2004; Firman,2013). Implementasi pendidikan multikultural di berbagai negara berbeda-

beda. Apabila dilihat pendidikan multikultural di Amerika Serikat, Tilaar (2004:138) menjelaskan, implementasi pendidikan multikultural di Amerika Serikat, meliputi dimensi : (1) kurikulum, yaitu norma-norma kultur yang akan disampaikan kepada peserta didik diintegrasikan dalam sebuah mata pelajaran dengan rumusan kompetensi yang jelas, (2) ilmu pengetahuan, yaitu perumusan keilmuaan dari norma kultur yang disampaikan dirumuskan melalui proses penelitian historis, (3) perlakuan yang adil dalam pembelajaran, (4) perberdayaan budaya sekolah dalam memberikan dukungan terhadap pengembangan pendidikan multikultural.

Apabila ditelusuri lebih lanjut dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia, Firman (2013) mengungkapkan pendidikan multikultural di Indonesia belum berjalan sebagai mana mestinya, kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : (1) sistem pendidikan yang tidak berorientasi pada rakyat, (2) tidak menumbuhkan kreatifitas peserta didik sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing, (3) korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) merasuk ke dalam berbagai lini, (4) pemikiran barat yang tidak diadaptasi sebelumnya, (5) ketimpangan dari status sosial, ekonomi dan domili, (5) kurikulum sarat ilmu pengetahuan dan belum tentu berguna dalam kehidupan, (6) siswa kurang bergairah dalam belajar karena kurang berorientasi budaya.

Setelah terjadinya perubahan kurikulum dengan diimplementasikannya kurikulum 2013, yang pada prinsipnya lebih berorientasi kepada peserta didik (*student centred learning*), memerlukan guru profesional sebagai actor utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Tuntutan terhadap guru profesional dalam pelaksanaan pendidikan multicultural semakin dirasakan oleh peserta didik, karena guru berperan sebagai manager pembelajaran bagi para peserta didiknya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi multikultural di dalam kelas menjadi wewenang dan tanggungjawab guru. Strategi dan sumber-sumber belajar multicultural yang akan digunakan dalam pembelajaran sepenuhnya berada di tangan guru. Begitu juga metode, materi pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas, juga menjadi tanggungjawab guru. Sekalipun sudah ada panduan tentang metode pembelajaran yang ditetapkan untuk digunakan

guru dalam menyajikan materi pelajaran, namun tetap saja guru memiliki kewenangan memilih dan menetapkan metode pembelajaran yang akan digunakannya di dalam kelas. Kondisi ini memerlukan wawasan guru dalam menciptakan pembelajaran kreatif dan inovatif dalam pelaksanaan kurikulum 2013.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memberikan pengaruh dalam proses pembelajaran. Kondisi ini sudah barang tentu akan member peluang ke arah yang lebih baik dalam pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah. Rosenberg (2001), menjelaskan dengan berkembangnya penggunaan TIK ada lima pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu: (1) dari pelatihan ke penampilan, (2) dari ruang kelas ke di mana dan kapan saja, (3) dari kertas ke on line atau saluran, (4) fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja, (5) dari waktu siklus ke waktu nyata. Komunikasi sebagai media pendidikan dilakukan dengan menggunakan media komunikasi, seperti: telepon, komputer, internet, e-mail dan sebagainya. Interaksi antara guru dan siswa tidak hanya dilakukan melalui hubungan tatap muka tetapi juga dilakukan dengan menggunakan media baik di kelas maupun di luar sekolah. Kondisi ini akan memberi peluang bagi guru untuk merangsang pembelajaran yang berorientasi multikultural dengan lebih kompleks lagi.

Berdasarkan uraian tersebut, menarik ditelusuri lebih lanjut, bagaimana penyelenggaraan pendidikan multikultural dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan majemuk masyarakat Indonesia. Pengupasan permasalahan tersebut bermanfaat untuk menemukan jalan keluar penggunaan teknologi informasi dalam mengoptimalkan pembelajaran yang berorientasi multikultural guna pengembangan hasrat serta kehendak masyarakat Indonesia berbangsa dan bernegara.

B. Silang Budaya dan Pendidikan Multikultural dalam Masyarakat Majemuk

Kemajuan masyarakat Indonesia dengan beranekaragam suku bangsa, agama, bahasa dan kebudayaan, sudah barang tentu akan mengalami berbagai permasalahan berkaitan dengan silang

budaya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan masing-masing suku, menjadi acuan bertingkah laku masyarakatnya. Persentuhan budaya sebagai manifestasi dinamika masyarakat tidak selamanya berjalan mulus. Permasalahan silang budaya dalam masyarakat majemuk seringkali bersumber dari masalah komunikasi, kesenjangan tingkat pengetahuan, status sosial, geografis, adat kebiasaan dan sebagainya. Kondisi tersebut merupakan kendala tercapainya consensus yang perlu disepakati masyarakat Indonesia.

Masyarakat majemuk Indonesia dengan beragam budaya memiliki standar perilaku yang berbeda satu dengan lainnya. Berbagai kegiatan dan pranata khusus dimana setiap kultur merupakan sumber nilai yang memungkinkan terpeliharanya kondisi kemapanan dalam kehidupan masyarakat. Setiap masyarakat cenderung menjadikan kebudayaannya sebagai acuan dalam hidup, sekaligus mengukuhkan jati diri etnik dengan kebudayaannya.

Perbedaan kebudayaan bermanfaat dalam mempertahankan identitas diri dan integrasi sosial masyarakat. Pluralisme masyarakat merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya dalam khasanah budaya nasional. Permasalahan multicultural merupakan suatu keindahan, apabila identitas masing-masing budaya dapat bermakna dan diagungkan oleh masyarakat pendukungnya serta dihormati oleh kelompok masyarakat yang lain. Masyarakat majemuk tidak jarang mengalami permasalahan setelah terjadi persentuhan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan lokal. Upaya penyeragaman budaya seringkali memperkuat penolakan dari budaya daerah dengan semakin menguatnya etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan pandangan bahwa kelompok sendiri sebagai pusat acuan dan kelompok lain akan dinilai lebih rendah. Etnosentrisme membuat kebudayaan diri sendiri sebagai patokan dalam mengukur baik buruknya, atau tinggi rendahnya kebudayaan lain.

Proses-proses demokratisasi, ideology di dalam masyarakat majemuk harus digeser menjadi ideology keanekaragaman budaya atau multi kulturalisme. Kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dijadikan sebagai acuan utama membangun jati diri bangsa.

Sentimen-sentimen kesukubangsaan yang memiliki potensi untuk terjadinya konflik perlu diatasi. Kendala utama dalam perwujudan kehidupan multikultural, disebabkan antara lain : (1) rendahnya tingkat pengetahuan, pengalaman, dan jangkauan komunikasi masyarakat dengan suku bangsa lain, (2) kurang maksimalnya media komunikasi dalam memerankan fungsinya sebagai mediator dan korektor informasi, dan (3) paradigma pendidikan yang lebih menekankan pengembangan intelektual dengan mengabaikan pengembangan kecerdasan emosional, pembentukan sikap moral, dan penanaman nilai budaya.

Penyelesaian permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan membangun kehidupan bersama melalui pendidikan multi kultural. Gagasan pendidikan multikultural mulai masuk serta dirasakan pentingnya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan multikultural mengandung arti , sebagai berikut : (1) pembelajaran tentang keragaman budaya sebuah pendekatan asimilasi kultural, (2) pengajaran tentang berbagai pendekatan dalam tata hubungan sosial, (3) pembelajaran untuk memajukan pluralisme tanpa membedakan strata sosial dalam masyarakat, dan (4) pembelajaran tentang refleksi keragaman untuk meningkatkan pluralisme dan kesamaan (Sada, 2004, Firman, 2009)

Sasaran utama dalam pelaksanaan pendidikan multikultural ditujukan untuk seluruh peserta didik dengan tidak membedakan perlakuan yang disebabkan perbedaan etnik, budaya dan agama. Prosedur utama yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan multikultur di Indonesia, melalui penyiapan kurikulum. Berbagai kompetensi yang harus dimiliki siswa tentang multikulturalisme disisipkan pada mata pelajaran yang relevan. Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah misi dan bukan sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Setelah kurikulum dirumuskan, selanjutnya dirancang berbagai pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Pendekatan pembelajaran multikultural sebaiknya mengacu kepada teori-teori yang ada. Pendekatan teori multikultural diawali dengan teori *melting pot* oleh J Hector yang menekankan penyatuan budaya dan melelehkan budaya asal. Setelah etnik di Amerika beragam

dan budaya kian majemuk, maka teori *melting spot* dikritik dan muncul teori baru, yang diberi nama *salad bowl* yang dipopulerkan oleh Horace Kallen. Teori salad bowl tidak menghilangkan budaya asal, tapi sebaliknya kultur-kultur lain di luar diakomodir dengan baik dan masing-masing memberikan kontribusi untuk membangun budaya nasional. Selanjutnya interaksi kultur antar berbagai etnik memerlukan ruang gerak maka berkembang teori *Cultural Pluralism*. Teori kultural pluralism membagi ruang pergerakan budaya menjadi ruang publik dan private. Melalui ruang public seluruh etnik mengatikalasikan budaya politik dan mengekspresikan partisipasi social politik mereka. Dalam konteks ini mereka homogen dalam sebuah tatanan budaya. Sedangkan melalui ruang private mengekspresikan budaya etnisitasnya secara leluasa (Budianta, 2003:8-9).

Pemenuhan kebutuhan akan kerangka acuan dalam kehidupan bernegara perlu dikembangkan kebudayaan nasional, sesuai dengan UUD 1945 pasal 32. Pengembangan budaya nasional melalui pendidikan multikultural secara terencana di sekolah Indonesia belum dilaksanakan secara optimal. Sehubungan dengan hal itu, pendidikan multikultural di Indonesia perlu dirancang Will Kymlicka (Kymlicka, 2000: ix), mendeskripsikan *Multicultural Citizenship*, pengalaman di Amerika utara, maka materi-materi seharusnya disampaikan dalam pendidikan multikultural menyangkut, dengan : (1) hak-hak individual dan hak-hak kolektif dalam masyarakat, (2) kebebasan individual dan budaya, (3) keadilan dan hak-hak minoritas, yakni seluruh anggota masyarakat memiliki hak yang sama memperoleh keadilan dari negara, (4) jaminan minoritas bisa berbicara dan terwakilkan aspirasinya dalam struktur pemerintahan atau legislatif, (5) toleransi dan batas-batasnya, yakni bahwa etnik minoritas yang tidak memiliki wakil langsung di lembaga legislatif atau dalam lembaga birokrasi pemerintahan, harus dilindungi oleh etnik atau kelompok mayoritas yang menguasai lembaga-lembaga pemerintahan sebagai lembaga otoritatif.

Pendidikan multikultural di Indonesia dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran : Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Pendidikan Moral Pancasila/Kewarganegaraan, Geografi, Sosiologi Dan Antropologi), Bahasa Indonesia serta berbagai kegiatan dalam Layanan Bimbingan

dan Konseling di sekolah. Pelaksanaan pendidikan multikultural secara komprehensif dimungkinkan akan berjalan dengan baik melalui kurikulum 2013. Sehubungan dengan hal itu, sekolah dituntut merencanakan dan mengontrol seluruh elemen sekolah yang dapat mendukung proses pendidikan multikultural dengan baik. Guru-guru merencanakan proses pembelajaran yang dapat menumbuhkan sikap multikultur siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang demokratis, menghargai hak azasi manusia dan keadilan. Sekolah diharapkan juga mempersiapkan guru yang memiliki persepsi, sikap dan perilaku multikultur.

Peralihan paradigma pembelajaran dari *teacher centred learning* ke *student centred learning*, memungkinkan guru dapat melakukan diskusi dengan berbagai variasi, simulasi, bermain peran, game serta karyawisata dalam pelaksanaan pembelajaran berwawasan multikultural. Strategi pelibatan siswa dalam belajar dengan strategi *collaborative learning*, *Active learning* membuat peserta didik lebih aktif mengakses berbagai informasi dari berbagai sumber seperti : buku teks, perpustakaan, internet atau sumber-sumber belajar lain. Melalui kegiatan tersebut, peserta didik memperoleh berbagai pengalaman yang tidak saja menambah kompetensi pengetahuan mereka, tetapi juga kemampuan analitis, sintesis dan menilai informasi yang relevan untuk dijadikan nilai baru. Berkaitan dengan hal itu, guru harus mampu merancang kegiatan belajar dengan merumuskan skenario pembelajaran, tujuan, sumber informasi, cara mengolah dan membahasnya serta menarik kesimpulan. Sedangkan *collaborative learning* adalah proses pembelajaran yang dilakukan bersama antara guru dengan peserta didik. Guru membantu berbagai kesulitan yang dihadapi siswa, begitu pula antar peserta didik lainnya. Sehingga *peer teaching*, atau *tutorial* menjadi bagian penting dalam kegiatan belajar seperti ini.

Selanjutnya pendekatan *cooperatif learning*, yang menurut Kauchak lebih efektif daripada *groupwork* (Kauchak, 1998: 234). *Groupwork* adalah sebuah proses pembelajaran yang memberi kesempatan pada semua siswa untuk terlibat dalam kelompoknya dalam melaksanakan tugas yang diberikan guru. Sehubungan dengan hal itu, guru diharuskan merencanakan proses pembelajaran,

diantaranya : (1) memberitahukan tugas siswa secara kelompok, (2) mempersiapkan siswa untuk melaksanakan tugas kelompok, (3) masing-masing siswa memiliki penjabaran tugas yang jelas dalam kelompoknya, (4) memberi siswa batas waktu yang jelas dan tegas dalam menyelesaikan tugas-tugas, (5) perintahkan siswa untuk menyelesaikan tugas mereka dalam kelompok.

Pelaksanaan pendidikan multikultur, melalui mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, agama, sejarah harus dilakukan secara komprehensif, dimulai dari design perencanaan dan kurikulum melalui proses penyisipan, pengayaan dan atau penguatan terhadap berbagai kompetensi yang telah ada, mendesign proses pembelajaran yang bisa mengembangkan sikap siswa untuk bisa menghormati hak-hak orang lain, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, bahasa dan budaya, dan tanpa membedakan mayoritas dan minoritas. Selanjutnya pencapaian tujuan pendidikan multikultur harus dapat dikur melalui evaluasi, dalam bentuk tes, non-tes atau melalui proses pengamatan longitudinal dengan menggunakan portofolio siswa.

C. Pendidikan Multikultural dalam Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Teknologi sebagai media pendidikan telah lama dimanfaatkan di negara-negara maju, misalnya : teknologi elektronika, seperti halnya radio, film, video, televise dan video kaset. Media TIK yang banyak tersedia di pasaran adalah CD/kaset audio, VCD, dan internet dalam pembelajaran secara terprogram. Masyarakat Indonesia telah berupaya memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, namun karena mengalami kesulitan dalam pengelolaan, baik menyangkut sumber daya manusia serta sarana pendukung maka hasilnya belum maksimal dirasakan masyarakat.

Media elektronika awalnya digunakan sebagai alat hiburan/penerangan dan belum didesain untuk pembelajaran. Setelah dilakukan berbagai penelitian ditemukan betapa besarnya potensi yang dimilikinya untuk digunakan sebagai alat penyampaian pesan dalam pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran. Salah satu keunggulan teknologi elektronika adalah

memiliki daya jangkau yang sangat luas dan dalam tempo yang sangat singkat dapat menyampaikan pesan pembelajaran. Melalui teknologi elektronika tersebut, dapat dikemas berbagai informasi materi pelajaran yang diperlukan peserta didik.

Dewasa ini terjadi perubahan pradigma dalam pendidikan yang semula bersifat *centralistic* menjadi *desentralistik*. Begitu juga perubahan paradigam dalam pembelajaran yang telah bergeser dari *teacher centred* menjadi *student centred*. Perubahan tersebut membawa konsekuensi dalam pengelolaan pendidikan serta pembelajaran, khususnya di tingkat sekolah. Kebijakan tersebut dapat dimaknai sebagai pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada sekolah, serta guru dalam mengelola sekolah serta pembelajaran, termasuk di dalamnya berinovasi dalam pengembangan kurikulum dan model-model pembelajaran. Peralihan kondisi pembelajaran tersebut lebih memungkinkan pelaksanaan pendidikan multikultural di sekolah.

Kesempatan berotonomi sekolah dan guru seyogyanya diimbangi dengan perubahan yang berorientasi kepada kinerja serta partisipasi secara menyeluruh dari komponen pendidikan yang terkait, member peluang dalam pelaksanaan pendidikan multikultural dengan baik di sekolah. Hal ini didukung oleh perubahan kurikulum yang awalnya kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) menjadi kurikulum 2013. Permasalahan tersebut diiringi oleh restrukturisasi dalam pengelolaan sekolah (*capacity building*), profesionalisme guru, penyiapan infrastruktur, kesiapan siswa dalam proses belajar dan iklim akademik sekolah dalam pelaksanaan pendidikan multikultural.

Penerapan kurikulum 2013 dan pemberian otonomi pendidikan kepada sekolah dan guru diharapkan melahirkan organisasi sekolah yang sehat dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Beriringan dengan perkembangan teknologi informasi, sekolah dan guru hendaknya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, dengan merancang dan mengembangkan media/bahan pembelajaran berwawasan multikultural berbasis teknologi informasi. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran melalui program e-learning. Melalui program e-learning, guru dapat

merancang dan mengembangkan bahan serta media pembelajaran berbasis pendidikan multikultural.

Pembelajaran pendidikan multikultural berbasis teknologi informasi komunikasi dengan menggunakan e-learning, berakibat pada perubahan budaya belajar dalam konteks pembelajaran. Perubahan yang terjadi, antara lain : (1) siswa dituntut secara mandiri dalam belajar dengan berbagai pendekatan, (2) guru mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, memfasilitasi dalam pembelajaran berwawasan multikultural, (3) tersedianya infrastruktur yang memadai, (4) administrator yang kreatif serta penyiapan infrastruktur dalam memfasilitasi pembelajaran pendidikan multikultural berbasis teknologi informasi.

Media komunikasi dan informasi dapat dimanfaatkan oleh guru dalam upaya pencapaian tujuan pembelajaran berwawasan multikultural dengan efektif. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan multikultural sangat cocok dengan perubahan paradigma pendidikan serta pembelajaran yang berlangsung dewasa ini. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi serta perubahan kurikulum di sekolah, telah berpengaruh terhadap proses relasi antara pendidik dengan peserta didik. Pembelajaran selama ini berpusat kepada guru telah berubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kondisi ini memungkinkan sekolah dan guru merancang serta melaksanakan pembelajaran multikultural secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia.

Perubahan paradigma pembelajaran dan perkembangan teknologi informasi menyebabkan perubahan peran yang harus dijalankan guru dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Guru dituntut mengidentifikasi berbagai permasalahan multikultural dan merancang pembelajaran. Selama berlangsungnya proses pembelajaran berwawasan multikultural, guru diharapkan memahami dan mengetahui secara jelas arah perkembangan peserta didik dalam pemahaman serta aktifitas kehidupan multikultural. Berdasarkan hasil penilaian itu, guru dapat mengevaluasi proses pendidikan

multikultural yang sudah berlangsung, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih pendekatan yang menyenangkan serta inovatif dalam pembelajaran multikultural berikutnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan pendidikan multikultural dapat dimodifikasi menjadi kegiatan menyenangkan dengan cara memberikan berbagai kesempatan kepada peserta didik untuk membuat kesimpulan/dan atau menjelaskan materi yang baru saja selesai dibahas. Peserta didik juga haruslah dikondisikan untuk mengajukan pertanyaan yang bersifat konstruktif berdasarkan pengalaman keseharian sehubungan dengan materi yang dipelajari,

Di samping itu, melalui pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, diharapkan guru menggunakan berbagai media teknologi informasi untuk membantu peserta didik agar dapat menghubungkan berbagai pengetahuannya dengan kondisi kehidupan multikultural nyata. Kondisi semacam ini dewasa ini sangat didukung dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat maraknya, baik yang sudah disediakan di sekolah maupun masyarakat. Guru diharapkan dapat merancang berbagai media dan bahan ajar berwawasan multikultural, selanjutnya mendorong peserta didik menggunakan sarana-prasarana teknologi informasi yang tersedia dalam pendidikan multikultural.

Perkembangan teknologi informasi dan perubahan paradigma pembelajaran telah merubah budaya guru serta peserta didik dalam pembelajaran. Guru dituntut merumuskan strategi pembelajaran yang bermakna untuk membuat peserta didik lebih aktif memanfaatkan sumber belajar dalam mencapai tujuan pembelajaran multikultural. Kemampuan guru merumuskan strategi pembelajaran yang bermakna, tergantung dari kreatifitas serta imajinasi mengablikasikan kondisi budaya masyarakat dalam pembelajaran berwawasan multikultural. Budaya merupakan keseluruhan yang ada dalam masyarakat, menyangkut dengan gagasan-gagasan, ide-ide, nilai-nilai, pola tingkah laku serta benda hasil karya. Pembelajaran berwawasan budaya menjadikan siswa tidak terasing dan dapat mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan kondisi yang ada di sekitar mereka.

Sebelum penggunaan media teknologi informasi dalam pembelajaran multikultural diharapkan guru : (1) mengidentifikasi materi pelajaran yang tersedia, (2) merencanakan waktu pemanfaatan media, (3) mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media teknologi informasi kepada peserta didik. (4) mengkomunikasikan rencana pemanfaatan media teknologi informasi kepada pengelola fasilitas teknologi informasi sekolah, (5) mengevaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran multikultural, serta (6) merancang tindak lanjut kegiatan berdasarkan hasil penilaian.

Penyiapan program pembelajaran multikultural berbasis teknologi informasi membutuhkan kemauan dan komitmen yang kuat untuk menuju ke arah itu. Pihak sekolah diharapkan merumuskan perencanaan dan leadership yang terarah dengan mempertimbangkan efektifitas dalam pembiayaan, integritas sistem teknologi serta kemampuan guru dalam mengadopsi perubahan model pembelajaran alam pembelajaran multikultural. Mempersiapkan budaya belajar berbasis teknologi informasi menuntut keterlibatan orang tua murid dan masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan multikultural. Kemampuan dan kemauan guru membuat pendidikan multikultural melalui desain instruksional sesuai dengan kaedah-kaedah paedagogis yang dituangkan dalam rencana pembelajaran sangat diharapkan. Langkah-langkah kongkrit yang harus dilalui oleh guru dalam pengembangan bahan pembelajaran, antara lain : mengidentifikasi bahan pelajaran multikultural yang akan disajikan setiap pertemuan, menyusun kerangka materi pembelajaran dan pencapaiannya sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Bahan pembelajaran multikultural tersebut selanjutnya ditampilkan yang dengan semenarik mungkin dalam bentuk power point, didukung oleh gambar, video dan bahan animasi lainnya agar siswa lebih tertarik dengan materi multikultural yang akan dipelajarinya.

D. Penutup.

Proses demokratisasi, ideology di dalam masyarakat majemuk dapat digeser menjadi ideology kebersamaan melalui pendidikan multikultur. Prosedur utama dalam pelaksanaan

pendidikan multikultur di dilalui melalui penyiapan kurikulum, yang menekankan materi berkaitan dengan hak-hak individual dan kolektif dalam masyarakat, keadilan dan hak-hak minoritas, kebebasan individual dan kebudayaan, jaminan berbicara bagi kaum minoritas, toleransi antar suku bangsa. Pendidikan multikultural di Indonesia dapat diintegrasikan dengan mata pelajaran : Agama, Ilmu Pengetahuan Sosial (Sejarah, Pendidikan Moral Pancasila/Kewarganegaraan, Geografi, Sosiologi Dan Antropologi), Bahasa Indonesia serta berbagai kegiatan dalam Layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah. Pelaksanaan pendidikan multikultural secara komprehensif dimungkinkan akan berjalan dengan menggunakan strategi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan multikultural dengan merancang dan mengembangkan media/bahan ajar bersumber dari berbagai budaya. Melalui berbagai media teknologi informasi tersebut, guru dapat menghubungkan berbagai pengetahuan siswa dengan kondisi kehidupan multikultur yang nyata. Langkah utama yang dapat dilakukan guru dalam dalam hal ini, antara lain : mengidentifikasi bahan pembelajaran multikultural, menyusun kerangka materi dan pencapaian indikator yang diharapkan dari pembelajaran multikultural.

Daftar Kepustakaan

Azra, Azyumardi, (2004) : *Pendidikan Multikultural; Membangun Kembali Indonesia Bhineka Tunggalika*, dalam Tsaqafah, Vol. I, No.2, tahun 2003.

Budianta, Melani, (2003) : *Multiculturalisme dan Pendidikan Multileultural, Sebuah Gambaran Umum*, dalam Tsaqafah, Vol. I, No.2, tahun 2003.

Firman, (2009) : *Tanggung Jawab Profesi Guru dalam Era Teknologi Informasi*. Medan : Pusat Pengembangan Profesi Tenaga Kependidikan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara.

-----, (2013) : *Silang Budaya dan Pendidikan Multikultural Di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045*. Padang : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Kymlicka, Will, (2000) : *Multicultural Citizenship, A Liberal Theory of Minority Rights*. New York : oxford University Press.

Suratno, Kamanto, (2004) : Multicultural Education in Schools, Challenges in its Implementation, dalam Jurnal *Multicultural Education in Indonesia and South East Asia*, edisi I, tahun 2004.

Tilaar, H.A.R., (2004) : *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

_____, (2004) : *Multikulturalisme, Tantangan-Tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Grasindo.